

**PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYIRKAH
DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG
NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)



OLEH

RIKA SUSANTI
10622003745

PROPESI S1

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **“PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG SYIRKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN SYARIAH ”**. Ditulis berdasarkan latar belakang bahwa syirkah merupakan salah satu sistem ekonomi dalam Islam dan dalam Islam intinya merupakan salah satu jalan untuk melakukan kelangsungan hidup dan sebagai sumber usaha kehidupan manusia pada saat sekarang ini, syirkah menurut Imam Syafi’i tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan perkonsian dengan mencampurkan harta itu untuk modal, kemudian bekerja pada harta itu dan membagi keuntungan dari hasilnya. Berdasarkan rumusan tersebut Bank Islam(Bank Muamalah) berarti bank yang catatanya beroperasinya berdasarkan pada tatacara bermuamalah secara islam, yakni mengacu pada al-Qur’an dan al-Hadis. Hal ini merupakan konsekwensi logis yang harus diperhatikan dalam perkembangan/bermuamalah.

Penulis menggunakan metode *library research* dengan menggunakan kitab al-Umm karangan Imam Syafi’i sebagai sumber primernya.

Adapun temuan dari skripsi ini adalah syirkah menurut Imam Syafi’i dan konsep syirkah menurut perbankan Islam, yang mana perekonomian perbankan walupun demikian dalam konsep Imam Syafi’i menetapkan harus adanya kesamaan modal, wewenang dan tanggung jawab yang sama antara suatu anggota dengan anggota lain.

Dalam perekonomian Islam selalu bertumpu kepada etika bisnis yang sehat, perbankan Islam adalah peranan yang diambil dari al-Quaran dan as-Sunnah. Dalam dunia bisnis Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan etika. Sedangkan perekonomian saat sekarang cenderung kepada kepentingan pribadi atau kelompok untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang berdasarkan kepada kebutuhan duniawi saja dengan membedakan agama dengan bisnis.

DARTAR ISI

Lembaran	Halaman
Persemnahan	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi.....	iii
Abstrak	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
 BAB II. SEKILAS TENTANG IMAM SYAFI'I	
A. Imam Syafi'i dan Bank Islam.....	13
B. Pendidikan Imam Syafi'i.....	15
C. Guru-guru dan murid Imam Syafi'i.....	20
D. Karya-karya Imam Syafi'i.....	23

BAB III. KONSEP TENTANG SYIRKAH PERBANKAN MUAMALAH

A. Pengertian dan dasar hukum syirkah.....	27
B. Unsur-unsur syirkah dan syarat-syarat syirkah	31
C. Macam-macam syirkah	34
D. Bank Islam (Bank Muamalah)	45
E. Fungsi dan tujuan Bank Muamalah	48
F. Konsep syirkah dalam Perbankan Islam.....	49
G. Undang-uandang tentang syirkah.....	53

BAB IV. PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYIRKAH UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN SYARIAH .

A. Konsep syirkah menurut Imam Syafi'i	54
B. Konsep syirkah dan undang-undang No.10 tahun 1998. .	60
C. Relevansi syirkah menurut Imam Syafi'i dan undang-undang No.10 tahun 1998	64
D. Refleksi konsep syirkah Imam Syafi'i dan undang-undang No.10 tahun 1998.....	67

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77

BAB I

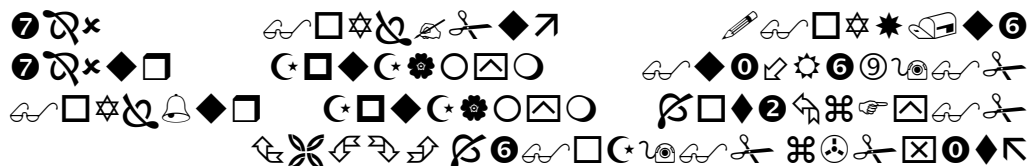
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik itu menyangkut tentang ibadah, muamalah serta bernegara semua itu diatur dalam Islam. sebagai satu-satunya agama yang paling sempurna serta memberikan kesejahteraan sepenuhnya kepada umat manusia baik didunia maupun yang diakhirat.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajak kepada pemeluknya untuk berupaya sekuat tenaga mencapai kebahagiaan yang sempurna, baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:



Artinya:" Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.¹

(Q.S.Al-Baqoroh 201)

Firman Allah tersebut menunjukan kepada kita betapa pentingnya dalam kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup dunia akhirat.

Di kehidupan manusia yang terpenting tersebut untuk dunia adalah bermuamalah, yang menitik beratkan kepada kehidupan duniawi.

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:PT al ma' Arif, 2000), Edisi Ke-22, h. 29.

Hal ini dianggap penting oleh agama, karna dunia bisa menjadi penunjang kehidupan selanjutnya, yakni akhirat.

Bermuamalah sangat perlu dalam pergaulan hidup manusia serta menjadi adat kebiasaan dari berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai sekarang. Hal ini disebabkan karna bermuamalah merupakan salah satu jalan yang sangat kompeten didalam melakukan kegiatan yang mendapatkan kebaikan guna untuk memperbaiki kehidupan manusia serta untuk melakukan hubungan sesama manusia lainnya.

Salah satu corak bermuamalah dalam islam dalam bentuk kegiatan usaha perdagangan adalah ***Syirkah***. *Syirkah* adalah akad antara orang-orang yang berkongsi (bersyarikat) dalam hal modal dan keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing.²

Syirkah terbagi dua macam, yaitu perkongsian *amlak* (kepemilikan) dan perkongsian *uqud* (kontrak). Perkongsian *amlak* adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan perkongsian *uqud* adalah yang bersifat ikhtariyah (pilihan sendiri). Adapun *Syirkah Uqud* didalam buku Syafi'i jafri yang terdiri :

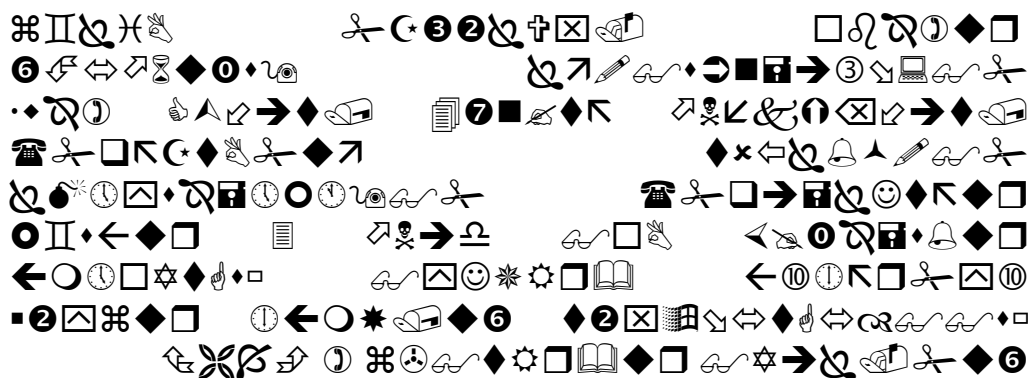
1. *Syirkah Inan*
2. *Syirkah Abdan*
3. *Syirkah Wujud*
4. *Syirkah Mufawadhah*.

² Syafi'i jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Prees, 2008), h. 107

Beberapa orang yang berserikat atau bersekutu dalam suatu bentuk pekerjaan, maka untuk melaksanakan serikat atau persekutuan itu harus mencampurkan harta mereka untuk dijadikan modal. Kemudian mereka berhak bertindak hukum terhadap harta serikat dan begitu pula dalam mendapatkan keuntungan yang telah disepakati.³

Syirkah menurut Imam Syafi'i adalah hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.⁴ Syirkah merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat kompeten bagi kehidupan sosial. Oleh sebab itu Islam menjadikannya sebagai salah satu macam muamalah yang dapat dipakai oleh kalangan masyarakat Islam itu sendiri.

Adapun dasar hukum Syirkah dalam firman Allah :



Artinya “ Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”(Q.S.Shaad: 24).

³ Rachmad Syafe'i, MA, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia,2004), h.186.

⁴ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*,(Tampa tempat: Ictisar baru Van Hoeve,1996), h.1711.

Dasar hukum Syirkah dapat di hubungkan dalam hadits Rasulluallah saw, yang berbunyi:

يقول الله تعالى: كين ما لم يحن حد هما صاحيه فاء ذا خان
حد هما صاحبه خرجت في بينهما

Artinya: “ Allah berfirman: Aku ini ketiga dari dua orang yang bersyrikat, selama salah seorang tidak mengkhianati terhadap temannya, apabila salah seorang berkhianat terhadapnya aku keluar diantara mereka(H.R.Abu Daud).⁵

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa Syirkah merupakan salah satu kegiatan ekonomi (muamalah) yang dapat dibenarkan didalam Islam. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa syirkah adalah sistem ekonomi Islam yang pada intinya merupakan salah satu jalan untuk melakukan kelangsungan hidup sebagai sumber usaha kehidupan manusia pada masa sekarang, dimana kebutuhan manusia semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman.

Berkenaan dengan sistem muamalah, dimana terjadi perkembangan kebutuhan manusia akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi akan merubah ekonomi manusia yang cenderung kepada perkembangan ilmu dan teknologi.

⁵ Ibid h.97

Syirkah merupakan salah satu sistem ekonomi kebanggaan umat Islam dari zaman dulu. Umat Islam di dalam melakukan aktifitas perdagangan di dalam dunia usaha akan menghadapi berbagai macam sistem perekonomian yang baru, hal ini merupakan tantangan bagi umat Islam itu sendiri, mulai dari masalah jual-beli, masalah dalam penanaman modal di perusahaan-perusahaan swasta, serta bermacam-macam bentuk perkongsian lain dalam permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa kini.

Sistem ekonomi masa kini tentunya belum ada secara jelas dalam al-Qur'an dan hadits serta dalam karya klasik (salaf) walaupun ada itu hanya dalam karya kitab Fiqih Moderen, yakni dalam pembahasan Syirkah diantaranya. Menerangkan jual beli dan investasi modal, yang selalu banyak dinanti oleh masyarakat.

Konsep Syirkah Islam bisa dikolerasi dengan sistem perekonomian masa kini, tentunya perlu pengkajian yang sangat mendalam mengenai hal tersebut memerlukan waktu yang sangat panjang. Perekonomian masa kini tidak terlepas dari pada sistem yang telah ada yang dianut oleh dunia barat, cenderung mengutamakan keuntungan tanpa memperhitungkan halal dan haramnya serta norma-norma yang berlaku didalam perekonomian. Menurut **H.Halide**, seorang ilmu ekonomi yang menyebutkan bahwa: Kebijakan atau sistem perekonomian umumnya berasal dari dunia barat yang didasarkan

kepada hitungan, untung ruginya sekuler dan bahwa sedikit sekali yang memperhitungkan moral agama dengan pendekatan kepada Islam.⁶

Perekonomian masa kini dilandaskan kepada sistem Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Merkantilisme yang cenderung mengutamakan kepentingan perorang dalam arti kebebasan mutlak, ini dianut oleh sistem kapitalisme. Sementara dalam sistem komunisme semua itu ditentukan oleh Negara sehingga tidak memberi peluang kepada perorangan untuk memperoleh hak usahanya.⁷

Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme dimana pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian dimana perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat, jika kita perhatikan bahwa tujuannya untuk mencapai kepuasan matrealistis masyarakat secara keseluruhannya.⁸

Namun dalam hal modal Imam Syafi'i mengatakan bahwa serikat dagang itu baru sah apabila kedua belah pihak sudah mencampurkan hartanya untuk dijadikan modal, adapun yang sesuai dalam pandangan Imam Syafi'i adalah *Syirkah Inan*.⁹

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press.1988) cet. Ke-2, h.4.

⁷ M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), Edisi 1, h.78

⁸ Murti Sumarni, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta :Liberti ,1998), Edisi 2, h.37.

⁹ Asy-Syafi'i , *Al-Umm Terjemahan*. Amiruddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), Juz VII, h.

Berdasarkan konsep Syirkah menurut Imam Syafi'i tidak dibolehkan apabila kedua belah pihak tidak melakukan percampuran harta itu, dan membagi untung dari hasilnya. Dalam Syirkah Imam Syafi'i lebih mempehatikan bentuk kerja samanya, kemudian cara memperolehnya serta memanfaatkannya bagi kedua belah pihak yang terkait.

Berangkat dari masalah ini penulis ingin mengetahui secara jelas apakah Konsep Syirkah menurut Imam Syafi'i tentang syirkah dan perbandingan dengan refeksinya dengan undang-undang No.10 1998 tentang perbankan syariah. Penulis memandang bahwa tulisan tentang Konsep Syirkah belum ada yang membuatnya dalam bentuk suatu tulisan karya ilmiah (Skripsi), dan penulis juga ingin mengangkat sistem perekonomian islam (Syirkah) untuk dapat mengatasi sistem perekonomian masa kini yang secara jelas, dan mengambil hal-hal yang relefan dengan konsep syirkah khususnya menurut Imam Syafi'i.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa dengan judul : “ **Pemikiran Imam Syafi'i tentang Syirkah dan Relevansinya dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah: Bagaimana konsep Syirkah menurut Imam Syafi'i dan perbedaannya dengan perbankan syariah dari rumusan tersebut, dapatlah diketahui sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Syirkah menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimana konsep syirkah dan Undang-undang No.10 tahun 1998 ?
3. Bagaimana relevansi Syirkah menurut Imam Syafi'I dan Undang-undang No.10 tahun 1998?
4. Bagaimana refleksi konsep syirkah Imam Syafi'i dan Undang-undang No.10 tahun 1998?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada bagaimana Konsepsi Syirkah menurut Imam Syafi'i dan refleksi undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Agar pembahasan yang penulis kaji dan mengarah serta dapat diketahui tujuannya yang menjadi latar belakang serta motifasi penulis untuk membahas masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep Syirkah menurut Imam Syafi'i.
- b. Untuk mengetahui konsep Syirkah dan Undang-undang No.10 tahun 1998.
- c. Untuk mengetahui Relevansi Syirkah menurut Imam Syafi'i dan Undang-undang No.10 tahun 1998.
- d. Untuk mengetahui Refleksi konsep syirkah Imam Syafi'i dan Undang-undang No.10 tahun 1998.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini tentunya penulis agar dapat berguna bagi penulis khususnya bagi masyarakat awam pada umumnya, adapun diantara kegunaannya pembahasan penelitian ini adalah memiliki beberapa nilai guna sebagai berikut:

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang konsep Syirkah menurut Imam Syafi'i, dan dapat pula digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, dan orang-orang yang membutuhkan.
- c. Untuk mengetahui persyaratan dalam menyelesaikan di Fakultas Syariah dan ilmu hukum dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang muamalah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data dari penelitian pustaka atau dikenal dengan sebutan *Library Research*, yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literature yang ada di perpustakaan. Sumber data sekunder :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu : Kitab Al-Umm, karya Imam Syafi'i dan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu: Buku yang berkaitan tentang syirkah Imam Syafi'i dan Undang-undang Perbankan Syariah, seperti: “ Syirkah menurut Imam Syafi'i” karangan Mohammad Yasir Abd Muthoib,, “Undang-undang perbankan Syariah” karangan Zubairi Hasan”.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data yang berasal dari literature perpustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literature yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca, dianalisa, dan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasi dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberi penganalisaan.

4. Metode Analisa Data

Setelah data tersusun, maka langkah seterusnya adalah memberi penganalisaan. Dalam memberikan analisa ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarka data.

5. Metode Penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Metode Induktif yaitu menggunakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

- BAB 1 : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Sekilas tentang Imam Syafi'i yang terdiri dari sejarah hidup Imam Syafi'i dan Bank Islam, pendidikan Imam Syafi'i, guru-guru dan murid Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i.
- BAB III : Konsep tentang Syirkah perbankan (Bank Muamalah), Bank Islam (Bank Muamalah), fungsi dan tujuan Bank Islam, konsep syirkah dalam perbankan Islam, undang-undang tentang syirkah.
- BAB IV : Pemikiran Imam Syafi'i tentang konsep Syirkah dan refleksinya dengan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah., yang terdiri dari konsep Syirkah menurut Imam Syafi'i, tentang Syirkah dan relevansinya dengan Undang-undang No.10 tahun 1998, Refleksi Syirkah menurut Imam Syafi'i dan dan Undang-undang No.10 tahun 1998, Refleksi konsep syirkah Syafi'i dan Undang-undang No.10 tahun 1998.
- BAB V : Bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

SEKILAS TENTANG IMAM SYAFI'I

A. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M).¹ Dan wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.² Di samping itu ada juga yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia.³ Ketika Ayah dan Ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Imam Syafi'i di Ghazzah atau Asqalan.⁴ Ketika ayahnya meninggal, ia masih kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Mekah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir.⁵

Di Makkah, Imam Asy-Syafi'i mengikuti latihan memanah. Dalam memanah ini, Imam Asy-Syafi'i mempunyai kemampuan di atas teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasarannya hanya sekali saja. Kemudian dia menekuni Bahasa Arab dan syair sehingga membuat

¹ Huzaimah Tahido Yangga, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), Cet. Ke-1, h. 120

² Ahmad As-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, terj., Sabil Huda, H.A. Ahmadi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), h. 141

³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj., Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 3

⁴ Huzaimah Tahido Yangga, *Op. cit*, h. 121

⁵ *Ibid*,

dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya, Imam Syafi'i lalu menekuni dunia fikih dan akhirnya menjadi ahli fikih terkemuka di masanya.⁶

Al-Ulaimi berkata, “Abu Abdillah Asy-Syafi'i adalah seorang imam yang agung, ilmuan yang dermawan, salah satu imam mujtahid dunia, pemegang pilar utama dalam Islam dan imamnya Ahli sunnah wal jamaah.”⁷

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris, bin Al-'Abbas, bin 'Utsman, bin Syafi'i, bin Al-Sa'ib, bin 'Ubayd bin 'Abd Yazid, bin Hasyim, bin Abd Al-Muththalib, bin 'Abd Manaf, bin Qushay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Kinanah, bin Khuzaymah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin 'Ud, bin Udad.⁸

Keturunan Imam Syafi'i selanjutnya : Abu Abdullah bin Idris bin Al-Abbas, Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu yazid bin hasyim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Beliau adalah dari keturunan suku (bani) Hasyim dan Abdul Muttalib. Keturunannya bertemu dengan Rasulullah SAW, pada datuk Rasulullah, yaitu Abdu Manaf. Lantaran itu dikatakan juga kepada Imam Syafi.i “Anak bapak saudara Rasul”.⁹

Dengan pertalian tersebut di atas Imam Syafi'i menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah, beliau dari keturunan “Zawil Kubra” yang berjuang sama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah.

⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), Cet. Ke-1, h. 356

⁷ *Ibid*,

⁸ Muhammad 'Afif Az-Za'by, *Nasihat Imam Syafi'i*, (Bandung: Al-Bayan, 1992), h. 17

⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. cit*, h. 142

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan.¹⁰

Bapak Imam Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu Imam Syafi'i adalah dari keturunan Al-Azd, nama ibunya ialah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyyah.

Semasa muda Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.¹¹

B. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau disraikan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan dan penjelasan gurunya. Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Syafi'i mendapat upah. Setelah menginjak umur yang

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*, h. 143

ketujuh, Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan baik.¹² Ia mempelajari Al-Qur'an pada Ismail ibn Qasantin, qari' kota Makkah.¹³

As-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Kemudian beliau melawat ke Madinah untuk mempelajari fiqh dan hadits dan masih banyak lagi kota yang beliau masuku dalam rangka studi.¹⁴

Beliau belajar fiqh pada Muslim ibn Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan Ibn Uyainah guru hadits di Mekkah dan pada Maliki ibn Anas di Madinah.¹⁵ Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal al-Muwathatha.¹⁶

Dengan berbekal kecerdasan otak yang luar biasa di sertai semangat kesungguhan menuntut ilmu, Syafi'i dalam masa mudanya dengan mudah mencerna seluruh ilmu pengetahuan yang diberikan oleh gurunya. Dalam usia relatif muda (lebih kurang 15 tahun), gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji telah memberikan kebebasan berfatwa. Namun walaupun demikian ia tetap merasa haus akan ilmu pengetahuan di samping mengeluarkan fatwa-fatwa.¹⁷

¹² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Op. cit*, h. 4

¹³ Huzaimah Tahido Yangga, *Op. cit*, h. 121

¹⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 204

¹⁵ *Ibid*, h. 204

¹⁶ Huzaimah Tahido Yangga, *Op. cit*, h. 122

¹⁷ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'i, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 149

Imam Asy-Syafi'i memperdalam fikih dari Muslim bin Khalid Az-Zanji dan imam-imam Makkah yang lain. Setelah itu ia pindah ke Madinah dengan tujuan berguru kepada Abu Abdillah Malik bin Anas.

Ketika di Madinah, Imam Malik bin Anas memperlakukan Asy-Syafi'i dengan mulia karena nasab, ilmu, analisa, akal, dan budi pekertinya. Imam Asy-Syafi'i lalu membaca dengan cara menghafal kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik kepada Imam Malik. Mendengar bacaannya terhadap *Al-Muwaththa'* ini, Imam Malik Merasa kagum, sehingga dia meminta agar Imam Asy-Syafi'i untuk membacanya kembali. Setelah beberapa lama bersama Imam Malik, akhirnya dia berkata kepada Asy-Syafi'i, “bertakwalah kamu kepada Allah.¹⁸ Sesungguhnya kamu di masa mendatang akan memiliki sesuatu yang agung.”

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, “Sesungguhnya Allah telah menyinari hatimu dengan nur-Nya, maka padamkan nur-Nya dengan berbuat maksiat.”

Setelah berguru kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i lalu pindah ke Yaman. Di Yaman ini, dia terkenal sebagai seorang berbudi luhur dan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah.

Dari Yaman, dia lalu pindah ke Irak untuk menyibukkan dirinya dalam ilmu agama. Di Irak, dia berdebat dengan Muhammad bin Ali Hasan dan ulama yang lain. Di sana, dia sebar ilmu hadits, mendirikan mazhabnya dan membantu perkembangan sunnah. Hasilnya, nama dan keutamaan Imam

¹⁸ Syaikh Ahmad Farid, *Op. cit*, h. 359

Asy-Syafi'i tersebar dan semakin dikenal hingga namanya membumbung ke angkasa memenuhi setiap daratan bumi Islam.

Berangkat dari perdebatan-perdebatan spektakuler yang belum pernah dijumpai sebelumnya ini, maka banyak dijumpai dari kalangan anak-anak, orang dewasa, ulama ahli hadits, ulama ahli fikih dan selainnya bercermin untuk mengambil manfaat dan ilmu darinya. Akhirnya banyak banyak sekali orang yang lari dari madzhab yang dahulu telah diikuti untuk pindah ke madzhab Imam Asy-Syafi'i serta berpegang teguh pada metode yang digunakannya.

Selama tinggal di Irak ini, dia menelurkan kitab kitab karyanya yang diberi nama kitab *Al-Hujjah* yang kemudian dikenal dengan *Qaul Qadim* Imam Asy-Syafi'i. Pada tahun 199 hijriyah, dia meninggalkan Irak untuk pergi ke Mesir. Semua karyanya yang dikenal dengan *Qaul jadid* di tulis di Mesir.¹⁹

Dan ketika di Mesir inilah, nama Imam Asy-Syafi'i banyak disebut-sebut orang, sehingga dirinya menjadi tempat tujuan banyak orang untuk menimba ilmu, baik yang berasal dari Irak, Syam maupun yang berasal dari Yaman.

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalany, selain kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, Malik dan Sufyan ibn 'Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim Alqadah, al-Darawardiy, Abd Wahhab al-Tsaqafiy, Ibn 'Ulayyah, Abu Damrah, Ismail bin Ja'far, Muhammad ibn

¹⁹ *Ibid*, h. 360

Khalid al-Jundi, ‘Umar Ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn Syafi’i, ‘Athaf ibn Khalid al-Mahzumi, Hisyam Ibn Yusuf al-Shan’any dan sejumlah ulama lainnya. Imam Syafi’i belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman. Di Yaman, pernah mendapat tuduhan dari Khalifah Abbasiyah (penguasa waktu itu), bahwa al-Syafi’i telah membaiat ‘Alawy. Karena tuduhan itu, maka ia dihadapkan kepada Harun al-Rasyid, khalifah Abbasiyah. Tetapi akhirnya Harun al-Rasyid membebaskannya dari tuduhan tersebut. Peristiwa itu terjadi tahun 184 H, ketika Syafi’i diperkirakan berusia 34 tahun.²⁰

Tahun 195 H, al-Syafi’i pergi ke baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H, ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan, kemudian tahun 198 H, pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat ‘Isya’. Imam Syafi’i dikuburkan di suatu tempat di Qal’ah, yang bernama Mishru Alqadimah.²¹

Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi’i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Syafi’i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hassan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu pada Imam Syafi’i berhimpun pengetahuan fiqh Ashab al-Hadits (Imam Malik) dan fiqh Ashab al-Ra’yi (Abu Hanifah).

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc. cit*, h. 122

²¹ *Ibid*, h. 123

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan adab, di samping pengetahuan hadits yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi fiqh Ashab al-Ra'yi di Irak dan fiqh Ashab al-hadits di Hijaz.

C. Guru-guru dan murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam di Mekah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.²²

Di antara guru-gurunya ialah:

1. Di Mekah

Muslim bin Khalid Az-Zinji

Sufyan bin Uyainah

Said bin Al-Kudah

Daud bin Abdur Rahman

Al-Attar

Abdul hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud

2. Di Madinah

Malik bin Anas

²² Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. cit*, h. 149

Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari

Abdul Aziz bin muhammad Ad-Dawardi

Ibrahim bin Yahya Al-Usami

Muhammad Said bin Abi Fudaik

Abdullah bin Nafi' As-Saigh

3. Di Yaman

Matraf bin Mazin

Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota San'a

Umar bin Abi Maslamah

Al-Laith bin Saad

4. Di Irak

Muhammad bin Al-hasan

Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi

Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi

Ismail bin Attiah Al-Basri

Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri

Murid Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Di antara murid-muridnya:

Di Mekah: Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-jarud. Di Baghdad: Al-

Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al-Husin bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri. Di Mesir: Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi.²³

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin Hambal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafi'i dengan katanya : Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain.²⁴

Imam Ahmad bin Hambal adalah diantara mereka yang paling banyak menghadiri majlis pelajaran Imam Syafi'i sehingga Az-Za'farani berkata : Pada tiap-tiap kali aku menghadiri majlis Imam Syafi'i maka aku dapati Ahmad bin Hambal selalu bersama di majlis tersebut. Ahmad bin Hambal sangat menghormati serta membesarkan gurunya Syafi'i.

²³ *Ibid*, h. 151-152

²⁴ *Ibid*, h. 152

D. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (Al-Adab) dan lain-lain.²⁵

Dalam jilid keempat belas dari kitab "Mu'jam Al-Udaba". Yakut menerangkan berpuluhan namun kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab hukum fiqh, kebanyakan bab ini telah dimasukkan kedalam kitabnya "Al-Um".²⁶

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.²⁷

²⁵ *Ibid*, h. 160

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. cit*, h. 133

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

1. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti Al-Umm dan Al-Risalah.

Kitab Al-Umm berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam al-Risalah. Selanjutnya, kitab al-Risalah adalah kitab yang pertama kali dikarang Imam Syafi'i pada usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. Al-Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd. Rahman ibn al-Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam al-Qur'an, nasih dan mansukh serta hadits Nabi. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya maka dinamai al-Risalah, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd al-Rahman ibn Mahdi di Makkah.²⁸

2. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy.

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab al-Risalah, tentang ushul fiqh
- b. Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.

- 1) Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila.

²⁸ *Ibid*, h. 134

- 2) Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
 - 3) Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.
 - 4) Kitab jami' al-'Ilmi.
 - 5) Kitab al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan.
 - 6) Kitab Siyar al-Auza'yi.
 - 7) Kitab Ikhtilaf al-hadits.
 - 8) Kitab Ibthalu al-Istihsan.
- c. Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
 - d. Al-imla'.
 - e. Al-Amaliy.
 - f. Harmalah (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
 - g. Mukhtashar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
 - h. Mukhtashar al-Buwaithiy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
 - i. Kitab Ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir, dan lain-lain.

Kitab al-Risalah merupakan kitab yang memuat ushul fiqh. Dari kitab al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh.²⁹

Selain kitab-kitab yang tertulis diatas masih banyak kitab Syafi'i lain yang beraliran mazhab Syafi'i, namun para ulama dan kitab yang dikarangnya diatas penulis anggap telah cukup mewakili dari kitab-kitab yang berhaluan Syafi'iyah.

Demikianlah kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i sebagai karya terbaik bagi orang ingin memahami fiqh mazhab Syafi'i.

²⁹ *Ibid*, h. 135-136

BAB III

KONSEP TENTANG SYIRKAH PERBANKAN MUAMALAH.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Sebelum membahas lebih jauh tentang syirkah, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian Syirkah baik secara lighat (etimologi) maupun secara istilah (termilogi). Kata syirkah breasal dari bahasa arab, yang fi'il madinya() selanjutnya ditashrifkan menjadi (, ,) artinya: bersekutu berserikat dengan dia.

Syirkah kadang-kadang dikatakan syarikat, tetapi yang lebih sering tapi sering digunakan adalah yang pertama, sehinga sebagian ulama mengatakan yang berlaku hanya perkataan syirkah.

Sedangkan syirkah menurut bahasa (lughat) adalah mempercampurkan salah satu macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.¹

Pengertian syrikah secara terminologi (istilah), memperbolehkan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan namanya. Hal ini dikarnakan syirkah tersebut syirkah tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Wujuh, Syirkah Mufawadhah.²

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fighul Islam*, Juz III,(Bairut: Darul al Fikr, t.th),h. 792

² Syafi'I Jafri, *Fiqih Muamalah*,(Pekanbaru:Suska Press,2008), h.107.

Syirkah menurut Mazhab Maliki adalah sesuatu izin bagi kedua anggota syarikat untuk melakukan pembelajaran (tasharruf). Menurut mazhab Hambali syirkah adalah merupakan persekutuan dalam pemilikan dan pembelajaran. Menurut Imam Syafi'I syirkah adalah hak tetap yang dimiliki dua orang atau lebih terhadap sesuatu (harta) secara menyeluruh. Sementara menurut Hanafi syirkah adalah gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang terhadap modal dan keuntungan.³

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pemikir Islam tentang syirkah maka dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan, dengan melakukan akad baik untuk mengembangkan hartanya maupun untuk menghasilkan hartanya (keuntungan).

Dari defenisi syirkah tersebut diatas dapatlah kiranya dijadikan sebagai acuan didalam mamahami syirkah bahwa pada dasarnya syirkah tersebut merupakan salah satu pentuk perkonsian didalam perdangangan.

³ *Op.cit.*, h.793.

2. Dasar Hukum Syirkah

Adapun yang menjadi dasar hukum syirkah adalah antara lain sebagaimana yang di syari'atkan dengan Kitabullah, Sunnah dan Ijma', sesuai dengan firman allah yang berbunyi:



Artinya : Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini. (Q.S.Shaad)⁴

Adapun dasar hukum syirkah dapat di hubungkan berdasarkan hadis Rasulluallah saw yang berbunyi:

يقول الله تعالى: كين ما لم يحن حد هما صاحيه فاء ذا خان

حد هما صاحبه خرجت في بينهما

Artinya : Allah swt, berkata: Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat,selama salah seorang tidak menghianati terhadap temannya, apabila salah seorang berhianat terhadapnya aku keluar diantara mereka (H.R.Abu Daud).⁵

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: PT Al ma' Arif,2000),Edisi Ke-22,h.186.

⁵ Syafi'I Jafri, *op.cit.*,h.97

Maksud dari hadis diatas adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama orang yang berserikat dengan memberi pertolongan dan limpahan rezeki dalam perniagaan mereka. Apabila diantara mereka telah melakukan khianat kepada yang lain, maka Allah akan mencabut pertolongan dan limpahan berkah dari keduanya.⁶

Mengutip dari tulisan Taqyudidin An-Nabhani dalam hukum syirkah mengatakan : perseroan (syirkah) boleh dilakukan sesama muslim atau sesama kafir Dzimmi, termasuk antara orang Islam dengan kafir Dzimmi. Sehingga orang Islam bisa melakukan perseroan dengan nasrani, majusi dan kafir dzimmi lainnya.

Hukum melakukan perseroan dengan orang yahudi , nasrani dan kafir dzimmi adalah mubah. Hanya saja, orang non muslim tersebut tidak boleh menjual minuman keras atau barang haram lainnya sementara mereka melakukan perseroan dengan orang muslim.

Sedangkan barang haram yang diperdagangkan sebelum mereka melakukan perseroan dengan orang Islam, laba penjualanya yang dipergunakan untuk mempergunakan untuk melakukan perseroan dengan orang Islam tetap boleh dipergunakan.⁷

⁶ Wahbah Az-Zuahaili, *op.cit*, h.793

⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*,(Surabaya:Risalah Gusti,1996),kek. Ke 2,h154.

Demikianlah beberapa dasar hukum dibolehkannya untuk melakukan syirkah yang berdasarkan al-Qur'an, Hadis, Ijma', sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, sehinggajelas bagi kita bahwa syirkah tidak hanya berlaku bagi orang Islam saja, namun bagi orang non muslim juga di benarkan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Islam.

B. Unsur-unsur Syirkah

Sebelum membahas tentang pembagian unsur-unsur syirkah, ada baiknya penulis mengungkapkan apa yang di maksud dengan serikat kerja (syirkah) menurut Sulaiman Rasyid, yaitu:

Dua orang ahli kerja atau lebih bermufakat atas suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Penghasilan (upah) nya, untuk mereka bersama menurut perjanjian mereka baik kepandaian keduanya atau berlainan, seperti tukang kayu atau tukang besi.

Begitu juga dengan penghasilan, sama atau tidak menurut perdamaian antara keduanya, hanya hendaknya di tentukan perbandinagannya sewaktu akad.⁸

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992),h.279-280.

Dari pernyataan Sulaiman Rasyid tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai unsur syirkah adalah:

- a. Adanya suatu bidang usaha
- b. Adanya suatu akad
- c. Adanya kerja sama dalam menjalankan usaha
- d. Memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh hukum syara'.⁹

Syarat-syarat Syirkah

Adapun syarat-syarat syirkah yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar ada lima syarat:

1. Benda (harta) di nilai dengan uang (dinar,dirham,dalam rupiah,dan lain-lain).
2. Harta-harta itu sesuai dengan jenis dan macamnya.
3. Harta-harta itu dicampur.
4. Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut.
5. Untung rugi di terima dengan ukuran harta masing-masing.¹⁰

Menurut pendapat para Ulama Madzhab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati seluruh harta syirkah bila para anggota sekutu lainnya tidak hadir, dan harta syirkah berupa rumah dan tanah dengan anggota syirkah lainnya; dan para anggota syirkah yang tidak hadir itu, ia tidak membebani pembayaran apapun.

⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Bulan Bintang,1974), Cet.1,h.22-24.

¹⁰ Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhar*, (Bairut: Daul al-Fikr,t.th),Jilid 1,h.280.

Ketentuan ini diambil atas dasar berlakunya adat istiadat yang menentukan bahwa pengambilan manfaat bagi anggota yang tidak hadir itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda tidak berfungsi sama sekali.¹¹

Ada syarat umum yang berlaku untuk syirkah Uqud (kontrak) dan syirkah Amlak (kepemilikan).

Syarat umum bagi syirkah uqud sebagai berikut:

- a. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa di wakikan.
- b. Pembagian keuntungan diantara anggota harus jelas.
- c. Pembagian keuntungan diambil dari lama perserikatan, bukan dari modal perserikatan.

Sedangkan syirkah amlak sebagai berikut:

3. Modal perseroan harus hadir, baik secara akad maupun ketika akan melakukan pembelian barang ini adalah pendapat jumhur fuqaha, maka tidak diperkenakan yang modalnya masih berupa hutang, maupun modalnya masih belum dihadirkan.
3. Modal perseroan berupa uang, ini kesepakatan empat mazhab, maka perserikatan yang modalnya berbentuk barang, baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak tidak diperkenakan.¹²

Demikianlah beberapa syarat yang ada dalam syirkah sebagaimana yang penulis paparkan di atas, merupakan satu hal yang harus dipenuhi didalam melakukan suatu serikat (perkonsian) untuk melakukan perdangangan (suatu usaha).

¹¹ Syafi'I Jafri, *Op.cit*, h.111

¹² Taqiyuddin an-Habhani, *op.cit.*, h.805-808.

C. Macam-macam Syirkah

Pada pokoknya syirkah dapat dibagi tiga:

a. Syirkah Ibahah

Syirkah Ibahah adalah persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu, misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput dan sebagainya yang belum ada dibawah kekuasaan perorangan.

Dalam suatu hadis nabi yang artinya sebagai berikut:

“Orang banyak tidak boleh dihaling-halangi menikmati manfaat tiga macam hal: air, padang rumput dan api “ (H.R. Ibnu Majah).

b. Syirkah milik

Syirkah milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Syirkah ini adalah syirkah yang bersifat ikhtiari dan bersifat jabari, yaitu:

1. Syirkah milik yang bersifat *ikhtiari* adalah beberapa orang bersekutu membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal bersama, sebidang tanah ditanami dan sebagainya.
2. Syirkah milik yang bersifat *jabari* adalah tidak berhak berbuat terhadap bagian teman sekutunya, kecuali bila mempunyai hak perwalian atas bagian itu dengan jalan wakalah (perwalian) atau washayah (wasiat). Kecuali itu tiap-tiap syirkah tidak berhak menikmati manfaat bagian teman sekutunya kecuali dengan izin yang berhak.

Meskipun demikian, menurut pendapat para ulama madzhab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati seluruh harta syirkah berupa rumah dan tanah sengan syarat tidak mengakibatkan kerugian seorangpun dari pada anggota syirkah lainnya; dan dalam menikmati bagian anggota syirkah yang tidak hadir itu, ia tidak dibebani pembayaran beban apapun.

Ketentuan ini diambil atas dasar berlakunya adapt istiadat yang menentukan bahwa pengambilan manfaat seperti itu diizinkan. Mengambil manfaat bagian anggota yang tidak hadir itu lebih baik hadir itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda tidak berfungsi sama sekali.

c. Syirkah akad

Syirkah akad adalah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Syarat-syarat perjanjian syirkah dapat dibagi dua; Syarat-syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum harus ada dalam segala macam syirkah, dan syarat khususnya hanya diperlukan dalam macam syirkah tertentu.

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam syirkah ialah:

- a. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian yang bercecakapan untuk menjadi wakil atau mewakili.
- b. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap anggota syirkah melakukan tindakan-tindakan hukum.

- c. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar potensinya, seperti separoh, seperdua dan sebagainya.¹³

Menurut mazhab Hanafi Syirkah uqud (akad) terbagi empat bagian yaitu:

1. Syirkah 'Inan

Syirkah 'inan adalah perserikatan yang dilakukan oleh para pemodal untuk menyerahkan harta masing-masing untuk dijadikan modal dagang dengan tujuan akan memperoleh keuntungan.

Syirkah ini tidak di syaratkan nilai modal, wewenang dan keuntungan dapat didasarkan kepada penyertaan prosentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal ini diperkenankan karna adanya kemungkinan tambahan kerja atau penanggungan resiko masing-masing pihak.¹⁴

Menurut Taqiyuddin an-Nabbni, perseroan 'inan adalah perseroan antara dua badan usaha dengan harta masing-masing dengan kata lain, dua orang melakukan perseroan dengan harta masing-masing untuk bersama-sama mengelola dengan badan mereka (tenaga kerja), kemudian keuntungan dibagi diantara mereka. Maka persoalan ini disebut perseroan 'inan karna masing-masing pihak sama-sama ikut mengelola.¹⁵

¹³ Syafi'I Jafri, *op.cit.*,h.109-114.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1988), Cet. Ke-2,h. 176.

¹⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit.*, h. 155.

Selanjutnya dijelaskan perseroan ini semacam menjadi investasi adalah uang. Sebab uang adalah nilai kekayaan dengan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak diperkenalkan untung mengadakan perseroan ini, kecuali kalau sudah dihitungkan nilainya pada saat melakukan transaksinya.

Syarat investasi tersebut harus jelas, sehingga dengan jelas dapat dikelola. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan perseroan ini dengan kekayaan yang tidak hadir jaga dengan kekayaan yang masih berupa hutang, sebab seandainya terjadi pembubaran itu harus dikembalikan pada investasi awal. Disamping itu, modal yang masih berupa hutang akan sulit dikelola secara langsung padahal disitulah tujuan perseroan tersebut.

Dalam perseroan ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai kekayaan dan tidak harus sejenisnya. Hanya saja , kekayaan itu harus dinilai dengan standar yang sama, sehingga kakayaan pemodal bisa meleburkan jadi satu.

Perseroan ini dibangun dengan sikap wakalah(bisa diwakilkan) dan amanah (kepercayaan). Sebab masing-masing pihak dengan memberikan kekayaan perseroannya serta dengan izinnya untuk mengelola kekayaan tersebut, maka masing-masing perseroan tersebut mewakili kepada perseronya.

Apabila perseroan tersebut telah sempurna, maka persero tersebut bisa melakukan kerja. Masing-masing persero boleh melakukan transaksi pembeli dan penjualan kaena alasan tertentu yang menurutnya membawa

kemaslahatan bagi persero lainnya. Masing-masing berhak melepaskan barang-barang dan berhak pula tidak sepakat.

Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini adalah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing dan begitu pula sebaliknya apabila mengalami kerugian maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syirkah ini merupakan yang berlaku pada saat ini. Syirkah ini tidak akan disyaratkan adanya persamaan, baik modal maupun dalam pempelanjanya, maka diperkenalkan modal anggota persero lebih banyak dari yang lain demikian pula adanya pembagian dalam kewenangan atau tasharruf yang berbeda. Ketidak samaan dalam modal tersebut apabila mengalami keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan modal masing-masing, demikian sebaliknya apabila mengalami kerugian maka akan diprosentasikan dengan modal masing-masing, sebagai kaidah:

الرّبع على ما شرّصا والو صنيعة على قدر المالين

Artinya: “ Keuntungan tergantung atas apa yang diperjanjikan dan kerugian disesuaikan dengan kadar modal masing-masing”.¹⁶

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*,h.797.

2. Syirkah Abdan/ A'mal

Syirkah Abdan juga disebut pula syirkah “Shoyani” jamak dari Shoni'taqobul dan umal jama' dari amilun yaitu : perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan. Misalnya tukang jahit, bengkel dan pelayanan barang lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Perseroan abdan ini adalah perseroan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain mereka melakukan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tenaga-tenaga mereka sendiri baik pekerjaan melalui pikiran atau fisik. Seperti pekerjaan antara Insiyur dengan tukang batu, dokter dengan pemburu sedangkan keuntungannya yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka.¹⁷

Masing-masing persero terlibat dalam suatu pekerjaan. Oleh karna itu para persero dengan beragam keahlian melakukan perseroan maka hukumnya mubah. Apabila melakukan perseroan, lalu yang lainnya mengeluarkan biaya dan yang lainnya melakukan dengan tenaga maka sahlah perseroan tersebut. Jadi apabila pekerja dalam suatu perusahaan melakukan perseroan, baik semuanya mengerti tentang industri atau yang lain hanya sebagian, sementara yang lain tidak mengerti sama sekali, kemudian mereka melakukan perseroan, dengan para pengrajin, pekerja, juru tulis dan kesemuanya itu menjadi anggota perseroan, maka hukumnya

¹⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit.*, h. 158

sah. Hanya saja syarat yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut dikerjakan dengan mubah apabila pekerjaan tersebut haram, maka persoalan dalam rangka melakukan pekerjaan tersebut hukumnya menjadi haram.

Menurut Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Zaidiyah : syirkah abdan ini diterima syara' karna tujuh dari syirkah ini adalah mencari keuntungan dan hak itu lebih banyak dilakukan. Syirkah bisa terjadi melalui harta dan pekerjaan, sebagaimana dalam mudharabah, dan syirkah dalam bentuk ini adalah syirkah yang melibatkan pekerjaan.

Mazhab Maliki menambahkan kebolehan syirkah ini, karna syirkah ini dengan syarat perbuatan yang dilakukan oleh para persero haruslah sama (sejenis) meskipun tidak sama pekerjaannya tetapi masih berhubungan dengan yang dikerjakan oleh persero lainnya maka hukumnya tetap boleh. Seperti pekerjaan untuk membangun rumah, sedangkan batu diperlukan untuk membangun rumah maka sahlah pekerjaan ini.

Mazhab Syafi'I, Imamiyah, Syiah tidak mau menerima syirkah ini. Karna syirkah menurut mereka bisa bergabung melalui harta (modal) bukan pekerjaan, disamping itu pekerjaan tidak bisa diukur sehingga membawa kemungkinan terjadinya penipuan. Pengaruh fisik dari anggota juga menghasilkan keuntungan yang berlainan pula.

Mazhab Hambali menambahkan alasan kebolehan syirkah ini, karena syirkah ini tetap diperbolehkan hingga dalam pekerjaan mencari rumput, kayu hutan, memancing dan barang mubah lainnya.

Pendapat Mazhab Hambali ini bertentangan dengan syarat uqud, padahal syirkah abdan adalah bagian dari syirkah uqud. Dikatakan demikian, bahwa syirkah uqud harus bisa diwakilkan dan akad wakalah sendiri tidak sah kalau objeknya berupa barang mubah. Karena hal itu dianggap oleh jumhur sebagai tindakan menguasai tindakan barang umum dan ini tidak sah.

3. Syirkah Al-Wujuh

Syirkah Al-Wujuh adalah serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali, mereka melakukan suatu pembelian dengan cara kredit dan menjualnya dan menjualnya dengan cara kontan, kemudian kalau dapat untung akan dibagi bersama.

Syirkah ini adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak luar dari orang (badan) tersebut.¹⁸

Termasuk dalam kategori syirkah wujud, apabila dua orang atau lebih melakukan perseoran dengan harta yang sama-sama menjadi pembeli, karena adanya kepercayaan pedagang kepada mereka, dan bukannya modal mereka. Syaratnya pemilikan mereka atas harta yang menjadi pembelian mereka harus sama atau dengan perbandingan yang

¹⁸ *Ibid*, h.163, Kemudian lihat, Ibnu Rusdy, *Biyatu'I Muftahid*, terj. M.A. Abdulrahman, (semarang : Asy-Syifa; 1990), Cet. Ke-3, h.271.

disepakati lain, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak milik mereka. Syaratnya pemilikan mereka atas harta yang menjadi pembelian mereka harus sama atau dengan perbandingan yang disepakati lain, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak milik mereka.

Ditentukan dengan pemilikan mereka atas harta pembeliannya, sebab status pembeliannya sama dengan harta mereka dan bukannya berdasarkan pada beban kerugian yang mereka sepakati, juga bukan keuntungan yang disepakati pula, baik keuntungan diantara mereka sesuai dengan hasil pembeliannya atau pun masing-masing berbeda sesuai dengan hasil pembeliannya.

Akan tetapi yang perlu dipahami, bahwa yang dimaksud kepercayaan disini adalah kepercayaan yang bersifat finansial, yaitu kepercayaan yang lahir karena kreadibilitas bukan pangkat atau kedudukan. Sebab bila kepercayaan tersebut digunakan dalam konteks bisnis tentu maksudnya adalah kepercayaan yang bersifat financial. Oleh karena itu terkadang seorang yang sangat dihormati, namun kreadibilitas tidak dipercaya yang bersifat finansial pada dirinya, dan bisa juga ia tidak sanggup memiliki kepercayaan yang bisa digunakan dalam konteks bisnis dan perseroan.

Menurut Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaidiah syirkah ini diperkenankan oleh syara' karena syirkah ini merupakan syirkah al-uqud yang memuat atau menerima perwakilan baik keperluan menjual atau membeli, juga karena modal syirkah ini sudah sering dilakukan dan terjadi

dikalangan manusia tanpa adanya perselisihan. Az-Zuaili menyimpulkan pendapat ini setiap pekerjaan yang disepakati, maka dikenakan melakukan kerja sama (syirkah) didalamnya.

Menurut Mazhab Maliki, Syfi'i, Imamiyah, Al-Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsauri syirkah ini hukumnya batal, karna unsur syirkah ini adalah dengan harta (modal) dan pekerjaan. Sedangkan dalam modal syirkah ini sama sekali tidak ditemukan dua unsur tersebut, lagi pula kemungkinan adanya penipuan yang terjadi.

4. Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah adalah, secara bahasa kesamaan dan secara istilah adalah aqad yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama dengan syarat adanya kesamaan baik kekayaan maupun kewenangan (tanggung jawab), dan bahkan agama.

Apabila salah satu anggota persero melakukan tasharruf baik itu pembelajaran maupun pembelian maka yang lain ikut menanggung terhadap tidakannya, artinya apabila mengalami kerugian maka tanggung jawab dari kerugian tersebut harus dipikul bersama dan satu sama lainnya tidak boleh lepas tangan dari lainnya.

Masing-masing persero harus sama modalnya, maka satu sama lainnya atau sebaliknya. Dalam syirkah ini juga disyaratkan persamaan dalam tasharruf maka tidak sah hukumnya bila kesamaan dalam agama,

maka tidak sah bila syirkah ini dilakukan antara muslim dengan non muslim.¹⁹

Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki membenarkan syirkah mufawadhah. Tetapi pengertiannya menurut ulama madzhab maliki tidak seperti diatas, yang berasal dari ulama madzhab Hanafi. Menurut ulama madzhab Maliki, yang dinamakan syirkah mufawadhah ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya, dengan keuntungan masing-masing anggota menyerahkan kepada anggota lain hak bertindak atas syirkah, baik anggota yang hadir semua atau yang tidak hadir dan tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya tanpa kewajiban memasukan harta baru yang tidak diperoleh salah seorang anggota didalam modal syirkah.

Syirkah mufaqadhah menurut pengertian Ulama Madzhab Hanafi itu hanya bersifat teoritis, tidak dapat terujud dalam praktek sehari-hari. Berbeda halnya dengan syirkah mufawadhah dengan pengertian yang diberikan ulama mazhab Maliki yang menitik beratkan pada penyerahan hak bertindak untuk kepentingan syirkah kepada masing-masing anggota itu, praktis dapat dilakukan dan dapat dibenarkan pula oleh para fuqaha madzhab lain. Terhadap Syirkah Mufawadhah menurut pengertian Ulama Madzhab Hanafi, Imam Syafi'i tidak dapat membenarkan.

¹⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit.*, h. 166.

D. Bank Islam (Bank *muamalah*)

Bank Muamalah adalah salah satu Bank Islam. Bank islam didirikan di mesir dengan nama the Mu Ghamar Bank, pada tahun 1963.²⁰ Sampai saat ini tercatat sudah banyak Bank Islam yang beroperasi di negara-negara Islam, bahkan di negara non muslim sekalipun.

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, dan diregulasi disektor perbankan, sejak 1 Juli 1983 membebaskan Bank-bank untuk mendapatkan sendiri tingkat bunganya. Hal ini bembirikan peluang bagi umat Islam untuk mengoperasionalkan Bank tanpa bunga (0%) dengan sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian murni.²¹

²⁰ Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-qur'an dan Masalah Perbankan* (Sebuah tilikan Antisifatif), (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 1997),h.144.

²¹ Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait* (BAMUI dan Takaful) di Indonesia, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997),h.75-76.

Ide konkrit pendirian Bank muamalah lokakarya”Bunga Bank Perbankan” yang diselenggarakan oleh majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Lokakarya tersebut memberikan kata akir tentang status hukum bunga Bank. Namun ketika K.H. Hasan Basri (waktu itu menjabat sebagai ketua MUI) mengusulkan pendirian Bank berdasarkan syari’ah Islam semua peserta lokokarya mencapai kata sepakat untuk mendirikan Bank tersebut.²²

Kemudian dipertegas dalam Munas IV MUI di hotel Said jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. setelah Munas IV, MUI membentuk kelompok kerja (pokya), yang diketahui oleh Prodjo Kusumo, sekretasis Jendral MUI.

Untuk kelanjutan pelaksanaan tersebut, Pokya membentuk tim kecil “Penyimpanan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh Dr. M. Amin Azis, dengan anggota M. Syahrul Ralis Siregar, A.Malik dan Zainul Bakar Noor SE, tim kecil ini selanjutnya diperkuat oleh Ir. Abdul Aziz Kunjoadji, Drs. Amir R. Batubara, Drs.Karnaen Permaatmaja MPA, Drs. Faudi Mourad, Chalid Hbs. BA, Jimly Asshiddiqie MA dan Abdul Manan MBA.²³

Pada tanggal 27 Agustus 1991, tim perbankan MUI melakukan pertemuan dengan mantan presiden RI ke-2 H.M.Soeharto, di bina graham. Dalam pertemuan tersebut Bapak H.M.Soehartondan H.Sudharmono berkenaan menjadi pemarkasa dan perencanaan pertemuan dengan para pengusaha muslim pada tanggal 11 Oktober 1991 di Bogor. Pada pertemuan

²² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 57-58.

²³ www.bi.go.id, *Sejarah Bank Muamalah*, diakses pada tanggal 13 Agustus 2010.

tersebut juga disepakati bahwa Bank Islam yang akan dibentuk itu diberi nama Bank Muamalah Indonesia atau disingkat dengan BMI.

Setelah lebih kurang setahun tercetus ide pendirian bank tanpa bunga, pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penanda tangan akte pendirian PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk, di hotel Sahid Jaya di hadapan notaries Yudo Paripurno SH. Dengan akte nototaris No. 1 tanggal 1 November 1991, dan izin Menteri Kehakiman No. C2.2413. HT.01 tanggal 21 Maret 1992/ Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No.34. Surat Menteri Keuangan RI No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Izin Usaha berdasar keputusan Menteri Keuangan RI No.430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992.

Adapun landasan Hukum Bank Syari'ah di Indonesia diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 sebagai refisi UU No.7 tahun 1992, yaitu pada pasal 1 angka 4,12,13,18 dan 23. pasal 6 huruf m, pasal 7 huruf c, pasal 8, pasal 11, pasal 13, dan pasal 29 angka 3. dalam pasal 13 UU No. 10 tahun 1998 dikatakan:

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lainnya dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasar prinsip pernyataan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan

adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²⁴

UU ini dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 72 tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil, yang secara jelas memberi batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh dilakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Lebih lanjut dalam penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah ini adalah prinsip muamalat dalam melakukan usaha bank.

E. Fungsi dan Tujuan Bank Islam (Bank Muamalat).

Fungsi Bank Islam sebagaimana fungsi bank pada umumnya adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat lain yang memerlukan. Tujuan didirikan Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan social ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja
 - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih

²⁴ UU RI No. 10 tahun 1998, *Tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h.10

cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena menganggap bahwa bunga bank itu riba.

3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan cara antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil, dan menumbuhkan semangat untuk menabung.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa fungsi Bank Muamalat hampir sama dengan bank konvensional, yaitu mengumpulkan dana dari dan menyalurkan dana kepada dan untuk masyarakat, dan keduanya juga dibawah pengawasan Bank Indonesia.

Berbicara mengenai syirkah (persekutuan) dagang adalah terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan pengertian, macam-macam, unsur syirkah dan rukun-rukunnya yang mengharuskan sahnya hukum tersebut.²⁵

F. Konsep syirkah dalam Perbankan Islam

Didalam perekonomian suatu Negara salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis adalah lembaga keuangan bank. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai pelantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul'I Mujtahid*, Terj.M.A.Abdurrahman, (Semarang:Asy Syifa; 1990), Cet.11,h.264.

melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.

Nilai fundamental telah melahirkan Islamisasi sektor finansial dengan fokus bank bebas bunga (*Free interest banking*) atau secara luas dikenal dengan bank Islam (*Islamic Banking*). Secara umum pengertian bank Islam (*Islamic Bankng*) adalah bank yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Menurut pakar hukum perbankan, Sutan Remy Sjadaini, UU hanya secara samara-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas perbankan berdasarkan bagi hasil.

Pasal 6 huruf m UU No.7 Tahun 1992 hanya menyebutkan bahwa Bank Umum dapat (m). menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dengan begitu ketentuan diatas hanya memberikan kewenangan kepada Bank Umum untuk menyediakan pembiayaan berdasarkan bagi hasil, serta belum mendorong agar Bank Umum menjadi Bank Syari'ah.

Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, ketentuan tentang perbankan syariah dinyatakan dalam pasal 1 angka 3 dan 4 bahwa (3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; (4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam

lalulintas pembayaran. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 13 UU No.10 Tahun 1998 prinsip syariah dijelaskan sebagai prinsip aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual belibarang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²⁶

Menurut Muhammad Budi Setiawan, prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang diharamkan, baik dari zatnya maupun dengan cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
4. Transaksi dilakukan atas dasar *ridha*.
5. Tidak ada unsur *riba*, *maysir* (perjudian/spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan/samara-samar).

²⁶ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.18, cet.1

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing atau PLS*).

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqoroh:208



Artinya Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Ayat tersebut dengan jelas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrowi. Hal ini sangat jelas karna Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah.

Walaupun dalam prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah yang berdasarkan prinsip bagi hasil, bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah yang bersangkutan yang bertujuan untuk menjamin modal (dari bank yang diberikan pada nasabah), dalam hal terjadi kerugian itu tidak diakibatkan kelalaian pengelola dana (*mudharib*).²⁷

G. Undang-undang tentang syirkah

Ketentuan umum syirkah.

Pasal 135

Syirkah Amwal dan Syirkah Abdan dapat dilakukan dalam bentuk Syirkah *'Inan, Syirkah Mufawadhah, dan Syirkah Mudharabah.*

Pasal 137

Kerjasama dapat dilakukan antara dua belah pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau dirugikan dibagi sama.²⁸

²⁷ www.bi.go.id, Syirkah (prinsip bagi hasil) pada pembiayaan di Bank Syariah, diakses pada tanggal 4 November 2010.

²⁸ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Bab IV* (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2009), cet.1, h.50,

BAB 1V

PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYIRKAH UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

A. Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i

Konsep syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i dalam pembahasan tentang syirkah ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga syirkah itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam Syafi'i didalam melakukan serikat (syirkah) adalah menyangkut masalah aqad, harta bentuk usaha (bentuk syirkah). Syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah perkonsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu.

Konsep syirkah menurut Imam syafi'i harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah :

1. Adanya percampuran harta.
2. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha).
3. Pembagian keuntungan.¹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa bukunya “ Al-Umm ” bahwa: *Syirkah Mufawadhah itu batal*. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara sama-sama (*mufawadhah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung bersama, maka hal ini tidak mengapa. Sebagian ulama bagian timur mengatakan bahwa syirkah ini adalah *Syirkah*

¹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj.H. Ismail Yakub, (Malaysia : Victory Agencie, 1989), jilid 5, Cet. Ke-2, h. 130.

Inan.² Imam Syafi'i tidak membenarkan semua syirkah tersebut kecuali Syirkah Inan.³ Dalam melakukan syirkah menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Jenis harta dari masing-masing pihak harus sama sifatnya, misalnya salah satu pihak memiliki dirham sedangkan yang lain dinar, atau salah satu pihak sendiri sedangkan yang lain adalah utang, maka syirkah itu tidak sah.
2. Harta masing-masing pihak itu harus sama dalam jumlahnya. Misalnya kalau harta itu berupa barang ia hendaklah bersekutu dalam usaha, maka masing-masing menjual sebagian barangnya dengan barang sekutunya, sehingga menjadi kerja sama diantara keduanya.
3. Laba dari kerja sama tersebut harus dibagi menurut jumlah modal yang mereka berikan. Misalnya apabila mereka memberikan jumlahnya sama, lalu mereka mensyaratkan meminta keuntungan lebih dari salah satunya, maka akad tersebut menjadi batal.⁴

Imam Syafi'i hanya membenarkan Syirkah Inan, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan syirkah inan ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi. **Pertama**; macam harta modal. **Kedua**; kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan. **Ketiga**; kadar perkerjaan dari dua perserikatan berdasarkan besarnya harta.

² *Ibid.*

³ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang : Asy-Asifa', 1992), h.154, dan Buku Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.176-179.

⁴ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* , h. 154-155, kemudian lihat di *Al-Umm*, h. 130.

a. Harta Modal

Mengenai macam harta modal, diantaranya ada yang disepakati oleh fuqaha' dan ada pula yang diperselisihkan. Kaum muslim telah bersepakat bahwa serikat dagang itu dibolehkan pada satu macam barang, yakni dinar dan dirham, meskipun pada dasarnya serikat “Inan” itu bukan merupakan jual beli yang terjadi secara tunai. Disepakatinya oleh para fuqaha' yang mempersyaratkan tunai pada jual beli dengan emas dan dirham, tetapi ijma' telah mengecualikan hal ini dalam serikat dangang.

Fuqaha' berpendapat tentang serikat dagang dengan dua macam barang yang berbeda pula. Jika kedua belah pihak berserikat dengan permodalan dua macam barang, atau dengan barang dan uang, maka cara seperti ini dibolehkan oleh Ibnu I'-Qasim, Imam Malik.

Namun Imam Syafi'i tidak membenarkan hal demikian, kecuali berdasarkan harga barang, harta permodalan yang berlainan menurut pandangan Imam Syafi'i harus sama.⁵ Begitu juga halnya dengan modal satu macam berupa makanan, Imam Syafi'i mengatakan sah apabila kedua belah pihak telah mencampurkan hartanya sehingga tidak dapat dipisahkan dari harta pihak lain.

⁵ Ibnu Rusdy, *op.cit.*, h.264-265.

Imam Syafi'i lebih menekankan kepada percampuran harta didalam syirkah, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Menurut penulis percampuran itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal (harta) yang lebih dari pihak lain.⁶

Dengan percampuran harta tersebut tidak akan merasa lebih dari masing-masing pihak karna harta tersebut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Dalam hal ini masing-masing pihak akan bekerja dengan sungguh-sungguh secara optimal untuk memperoleh keuntungan yang besar, dan dimungkinkan juga bahwa tidak akan timbul kecurangan, kecemburuan dari masing-masing pihak yang berserikat.

b. Pembagian Keuntungan

Fuqaha' telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikuti kepada modal yaitu apabila modal, yaitu modal keduanya sama maka besar keuntungan separuh-separuh. Kemudian mereka berselisih paham tentang modal yang berbeda apakah dibagi sama juga, Imam Malik, Imam Syafi'i bahwa cara seperti itu tidak boleh.

⁶ Imam Syafi'i menyaratkan adanya percampuran harta, menurut akal pikiran, dengan adanya percampuran harta tersebut, maka pekerjaan kedua belah pihak yang berserikat menjadi lebih utama dan sempurna. Karna masing-masing pihak dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pihak lainnya, seperti halnya kepada dirinya sendiri. Lihat , Ibnu Rusdy, *Ibid*, h.267, kemudian menerangkan bahwa Imam Syafi'i mencampurkan harta masing-masingpihak hendak ah harta itu sama dalam jumlahnya. Kalau harta keduanya berupa barang ('ardh) dan ia hendak bersekutu dalam usaha, maka masing-masing mmenjual sebagian barangnya dengan barang sekutunya sehinga menjadi kerja sama antara keduanya, kemudian masing-masing mengizinkan sekutu mengendalikannya. Dapat dilihat Hafid Abdullah, *op.cit.*, h.154.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan tergantung pada modal yang mereka sepakati, demikian juga halnya bila terjadi kerugian.⁷ Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya juga tidak sama pembagiannya, dan boleh juga sama.⁸

Namun apabila modal yang mereka berikan masing-masing jumlahnya sama, lalu mereka mensyaratkan meminta dalam keuntungan, atau tidak sama dalam modal, lalu mensyaratkan minta pembagian keuntungan sama, maka akad tersebut batal. Kemudian keuntungan tersebut dibagi menjadi modal yang diberikan mereka masing-masing, dan masing-masing boleh menuntut upah pekerjaannya.⁹

Imam Syafi'i berpegang bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebahagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar harta modalnya.

Dalam pandangan Imam Syafi'i menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu diperbolehkan dari besarnya modal yang diberikan oleh masing-masing pihak, bukan kepada besarnya laba yang diperbolehkan kemudian sama rata.

⁷ *Ibid.*, h. 155

⁸ Kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya, namun yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda-beda dan boleh juga sama nilainya. Sedangkan boleh membagi laba secara merata(fifty-fifty), dan boleh tidak sama. Ali ra, berkata : " *Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama* " (H.R. Abdulrazzak, didalam *Al-Jami*), lihat, Taqyuddin An-Nabhani, *op.cit.*, h.157.

⁹ Hafid Abdullah, *op.cit.*, h. 155.

c. Usaha (kadar pekerjaan)

Usaha suatu pekerjaan mengikut kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Dengan disyaratkan kesamaan harta oleh Imam Syafi'i dengan memandang kepada usaha, karna ia beranggapan bahwa pada umumnya usaha itu sama. Jika harta keduanya tidak sama, maka akan timbul kerugian atas usaha salah satunya. Itu sebabnya Ibnu I-Mundzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang kebolehan serikat dagang, dimana masing-masing dari keduanya berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak lainnya.¹⁰

Adapun syirkah (kerjasama) badan itu ialah suatu kerja sama dalam usaha dengan menggunakan badan. Kerjasama semacam ini menurut Imam Syafi'i adalah kerjasama yang bathil. Masing-masing pihak hendaklah mengambil upah pekerjaanya sendiri-sendiri.¹¹

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa usaha yang dilakukan dalam pandangan Imam Syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha, kemudian apabila melakukan usaha melakukan usaha melalui badan usaha maka masing-masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masing-masing. Menurut penulis ini menunjukan bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan kepada keahlian masing-masing.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h.286.

¹¹ Hafid Abdullah, *loc.cit.*, h. 155

Demikianlah beberapa hal yang berkenaan dengan konsep syirkah menurut Imam Syafi'i hanya membolehkan syirkah Inan merupakan salah satu sistem ekonomi islam yang menjadi patokan penulis.

B. Konsep Syirkah dan Undang-undang No.10 tahun 1998

Syirkah dalam bahasa Arabnya berarti pencampuran atau interaksi. Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Syirkah dalam fiqih Islam ada beberapa macam: di antaranya yang kembali kepada perjanjiannya, dan ada juga yang kembali kepada kepemilikan. Dari sisi hukumnya menurut syariat, ada yang disepakati boleh, ada juga yang masih diperselisihkan hukumnya.

Adapun syirkah tersebut bisa berbentuk perseroan hak milik (syirkah Amlak) atau persoalan transaksi (syirkah Uqud). Dalam hal ini dapat di klasifikasikan macam-macam syirkah, yaitu:

1. Syirkah Amlak adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa adanya ikatan akad syirkah. Syirkah ini adakalanya bersifat ikhtiyari dan bersifat jabari.
2. Syirkah Uqud adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan akad dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan¹².

¹² Secara garis besar menurut fuqaha' amshar (negeri-negeri besar), serikat (persekutuan/perseroan) itu dibagi empat macam yaitu : syirkah *Inan*, syirkah *Abdan*, syirkah *Mufawadhah*, dan syirkah *Wujuh*, namun telah disepakati oleh fuqaha' adalah syirkah Inan, meskipun sebagian fuqaha' tidak mengenal kata-kata tersebut, dan meski pula fuqaha' memperselisihkan beberapa syaratnya, sedangkan tiga serikat lainnya masih memperselisihkan

Syirkah ini terbagi empat macam:

- a. *Syirkah Inan*
- b. *Syirkah Abdan*
- c. *Syirkah Wujud*
- d. *Syirkah Mufawadhah* ¹³.

Pembagian syirkah tersebut diatas merupakan sistem perekonomian yang ada dalam Islam dalam bentuk perseroan (serikat) yang mengacu kepada Al-qur'an dan hadis. Dalam hal ini apabila salah seorang anggota syirkah tidak hadir maka teman serikatnya yang tidak hadir. Karna pengambilan manfaat seperti itu tidak berfungsi sama sekali.

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*) dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti.

Kebangkitan kembali nilai-nilai fundamental telah melahirkan Islamisasi sektor finansial dengan fokus bank bebas bunga (*Free interest banking*) atau secara luas dikenal dengan bank Islam (*Islamic Banking*).

oleh fuqaha', dan diperselisihkan pula tentang sebagian syarat-syaratnya, yakni bagi mereka yang menyetujuinya. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : Assy-Syifa', 1990), Juz III, h.268.

¹³ Syyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : Alma'arif, 1988), jilid 13, Cet. Ke-2, h. 176.

Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Banking*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUP), telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan Indonesia dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) UUP memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁴

¹⁴ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.18

Menurut Muhammad Budi Setiawan, prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah :

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama *ridha*.
5. Tidak ada unsur *riba*, *maysir* (perjudian/spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar).

Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), tetapi berdasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing atau PLS*).¹⁵

¹⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah, dari Teori praktik*, (Jakarta: Gema Insani), 2001.

C. Relevansi Syirkah menurut Imam Syafi'i dan Undang-undang No.10 tahun 1998.

Syirkah menurut Imam Syafi'i adalah hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.¹⁶ Syirkah merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat kompeten bagi kehidupan sosial. Oleh sebab itu Islam menjadikan sebagai salah satu macam muamalah yang dapat dipakai oleh kalangan masyarakat islam itu sendiri.

Para ulama kembali berbeda pendapat tentang hukum syirkah ini: Kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah membolehkannya. Sedangkan Imam Syafi'i melarangnya.

Alasan pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut:

1. Karena syirkah ini menggabungkan beberapa macam bentuk syirkah yang masing-masing dari syirkah itu dibolehkan secara terpisah, maka demikian pula hukumnya bila dikombinasikan.
2. Karena masyarakat di berbagai tempat dan masa telah terbiasa melakukan bentuk syirkah semacam ini tanpa ada pula ulama yang menyalahkannya.

Sementara alasan Imam Syafi'i melarangnya adalah sebagai berikut: Karena syirkah ini sebetulnya perjanjian usaha yang mengandung penjaminan terhadap jenis hal yang tidak diketahui, dan juga jaminan terhadap sesuatu

¹⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Tampa tempat: Ictisar baru Van Hoeve, 1996), h.171.

yang tidak diketahui. Keduanya sama-sama rusak secara terpisah, apalagi bila digabungkan.¹⁷

Dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Bank Umum Konvensional. Sementara itu untuk operasionalnya perbankan syariah selama ini, di atur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang meliputi kegiatan usaha yang tidak mendukung unsur-unsur riba, *maisir gharar*, haram, dan zalim.

Berhubungan dengan masalah diatas seperti tang telah dikemukakan mengenai konsep syirkah menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Undang-undang perbankan syariah , jelas sekali bahwa konsep syirkah ini mempunyai nilai persamaan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah. Hal ini berarti bahwa menurut Imam Syafi'i dalam relevansinya dengan Undang-undang Perbankan Syariah. Artinya apabila dalam konsep syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i itu diterapkan dalam perbankan syariah yang sekarang di lakukan oleh perbankan syariah.

¹⁷ Sumber : Alsofwah.or.id

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa prospek syirkah menurut Imam Syafi'i ini, sebetulnya lebih baik dari pada konsep persekutuan yang terdapat dalam ekonomi saat ini. Konsep syirkah sebenarnya lebih baik dari pada persekutuan yang terdapat dalam ekonomi saat ini. Karna dalam perekonomian Islam, Islam meletakkan ekonomi pada tengah-tengah dan keseimbangan yang adil yang dalam bidang ekonomi diterapkan dalam segala segi, imbang antara modal dan usaha, antara golongan-golongan dalam masyarakat dan sebagainya.

Lain halnya dengan sistem ekonomi islam (mengenai syirkah) itu nantinya akan menjuru pada perbankan yang sehat, kalau kita perhatikan konsep syirkah menurut Imam Syafi'i lebih menekankan sifat kehati-hatian dalam melakukan perserikatan diantara kedua belah pihak, dimana ia mengatakan bahwa antara dua orang yang berserikat itu hartanya harus dicampur sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya, ini menunjukan bahwa masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab yang sama, sehingga akan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tanpa ada kecurigaan antara keduanya.

Didalam perekonomian Islam selalu bertumpu kepada etika bisnis yang sehat. Sedangkan etika bisnis dalam prospek Islam adalah penerapan ajaran-ajaran Islam adalah penerapan ajaran-ajaran Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dalam dunia bisnis.

D. Refleksi Konsep Syirkah Imam Syafi'i dan Undang-undang No.10 tahun 1998

Imam Syafi'i menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan tergantung pada modal yang mereka sepakati, demikian juga halnya bila terjadi kerugian.¹⁸ Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya juga tidak sama pembagiannya.¹⁹ Dalam Syirkah Imam Syafi'i lebih mempehatikan bentuk kerja samanya, kemudian cara memperolehnya serta memanfaatkannya bagi kedua belah pihak yang terkait.

Pengembangan Bank Syariah secara resmi diperkenalkan sejak tahun 1992, yaitu seiring dengan diberlakukan UU No.7 tahun 1992 dan kemudian disempurnakan melalui UU No. 10 tahun 1998 tentang reformasi peraturan perbankan, yang diinterpretasikan untuk memberikan peluang seluas-luasnya membuka usaha perbankan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip bagi hasil (*bank syariah*). Perkembangan perbankan syariah yang hingga kini menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan walaupun populasinya tidak sebesar bank-bank umum konvensional lainnya.

¹⁸ *Ibid.*, h. 155

¹⁹ Kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya, namun yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda-beda dan boleh juga sama nilainya. Sedangkan boleh membagi laba secara merata(fifty-fifty), dan boleh tidak sama. Ali ra, berkata : " *Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama* " (H.R. Abdulrazzak, didalam *Al-Jami*), lihat, Taqyuddin An-Nabhani, *op.cit.*, h.157.

Terdapat kemungkinan perkembangan bank syariah di masa mendatang cukup positif, dan terbukti telah mendapat sambutan baik dari masyarakat pada umumnya, serta nasabah khususnya. Hal ini terlihat adanya beberapa bank-bank umum, baik milik pemerintah maupun swasta nasional yang kini berlomba-lomba untuk membuka (konversi) kantor cabang-cabangnya menjadi bank syariah dan termasuk membuka unit jasa keuangan komersial lainnya seperti layanan jasa reksa dana, anjak piutang (*factoring*), dana syariah, pasar modal dan obligasi syariah yang pada akhirnya memberikan peluang perkembangan positif tentang pendanaan, baik bersifat sosial ekonomi dalam memperdayakan perekonomian berbasis kerakyatan di berbagai daerah dan masyarakat Islami, maupun berdasarkan pengelolaan dan operasional perbankan syariah yang mengacu pada etika moral, teknis pelaksanaan dan mekanisme dengan konsep syariat Islam (Al-Quran, Hadis Rasulullah dan Ijma para ulama/cendekiawan muslim).²⁰

Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan *syirkah* Pada Perbankan Syariah

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Dalam mendistribusikan dana kepada masyarakat, bank syariah dapat melakukannya dengan prinsip *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah* dan *musyarakah*.

²⁰ www.lawsripsi.com published on October 2008
by Onti-Rug

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal (uang atau barang) yang telah ditetapkan dalam perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dimana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan menurut bagian yang ditentukan menurut porsi modal masing-masing atau kesepakatan.

Dengan demikian perjanjian pembiayaan *musyarakah* merupakan hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank dengan pihak nasabah masing-masing sebagai mitra pemilik modal untuk membiayai dan menjalankan suatu usaha yang halal dan produktif. Hubungan hukum ini akan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban timbal balik bagi masing-masing pihak. Pada praktik di Bank Syariah, hubungan hukum pemberian fasilitas pembiayaan *musyarakah* antara bank dengan nasabah dituangkan dalam kontrak atau akad pembiayaan *al-Musyarakah*.

Didalam kontrak akad *al-Musyarakah* tersebut ditentukan bahwa adapun hak-hak dan kewajiban para pihak, adalah sebagai berikut 4:

1. **Hak dan kewajiban bank**

Adapun hak-hak pihak Perbankan Syariah yang timbul dari akad pembiayaan proyek *musyarakah*, adalah sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran kembali fasilitas pembiayaan dilakukan melalui bank sendiri atau ditempat lain yang ditunjuk oleh bank, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama nasabah di bank (pasal 6). Form Akad *Al-Musyarakah* Perbankan Syariah.

- b. Atas izin nasabah, bank memasuki tempat usaha, tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha baik langsung maupun tidak langsung (pasal 10).
- c. Menuntut/menagih pembayaran dari nasabah dan/atau siapa saja yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank, untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lain, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :
 - 1) Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada bank sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pasal 3 dan pasal 5 akad *musyarakah*;
 - 2) Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada pasal 10 akad *musyarakah* ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau nasabah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam pasal 9 dan/atau pasal 12 akad *musyarakah*;
 - 3) Sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;

- 4) Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh dibawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi (pasal 11).
- 5) Bank atau kuasanya dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi pembiayaan oleh bank berdasarkan akad *musyarakah*, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada pembuat photo copynya (pasal 13).

Selain mendapatkan hak-hak, seperti disebutkan di atas Bank Syariah Mandiri dibebankan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a) Menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai modal usaha (pasal 2).
- b) Menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan setiap menerima surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan dan/atau akta dari nasabah (pasal 4).
- c) Menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad, kecuali apabila kerugian itu terjadi karena ketidak jujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 9, 10 dan/atau 12 (pasal 5).
- d) Melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh nasabah, selambat-lambatnya pada hari ke 5 sesudah bank menerima perhitungan usaha tersebut dari nasabah disertai dengan data yang lengkap (pasal 5).

- e) Menanggung segala kerugian secara proporsional, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut pasal2 (pasal 5).

2. Hak dan kewajiban nasabah

Seperti pihak Perbankan Syariah, juga pihak nasabah mendapatkan hak-hak dari akad pembiayaan proyek *musyarakah*, yaitu menarik pembiayaan, setelah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyerahkan kepada bank permohonan realisasi pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja bank dari saat pencairan harus dilakukan;
- b. Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen nasabah, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad *musyarakah*;
- c. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya (pasal 4). Sedangkan kewajiban-kewajiban pihak nasabah, adalah sebagai berikut :
 - a) Menyetorkan modal sebagai fasilitas pembiayaan (pasal 2).
 - b) Membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uang, dan menyerahkan kepada bank setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, (pasal 4).
 - c) Menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan *musyarakah*, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari kelima bulan berikutnya (pasal 5).

- d) Menanggung kerugian sebesar porsi pembiayaan yang disetorkan (pasal 5).
- e) Menanggung seluruh biaya yang diperlukan dan berkenaan dengan pelaksanaan akad *musyarakah*, seperti jasa notaris, administrasi, asuransi dan biaya lain sepanjang diberitahukan oleh bank dan disetujui oleh nasabah sebelum ditandatanganinya akad *musyarakah* (pasal 7).
- f) Membayar setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku melalui bank yang bersangkutan (pasal 7).
- g) Menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada kesesuai dengan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad *musyarakah* (pasal 8).
- h) Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan bank sesuai dengan *nisbah* pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada berita acara yang dilekatkan dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad *musyarak* (sama dengan pasal 6);
- i) Memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut nasabah maupun usahanya;
- j) Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening nasabah dibank;

- k) Membebaskan seluruh harta milik nasabah dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan bank berdasarkan akad *musyarakah*;
- l) Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri;
- m) Menyerahkan kepada bank perhitungan usahanya yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan yang ditetapkan dalam pasal 5 akad *musyarakah*;
- n) Menyerahkan kepada bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta bank kepada nasabah;
- o) Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau setidaknya tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 9);
- p) Menutup asuransi berdasar syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan bagi pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* pada perusahaan asuransi yang ditunjuk bank, dengan menetapkan bank sebagai pihak yang berhak menerima;

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penganalisaan terhadap masalah syirkah menurut Imam syafi'i tentang Syirkah dan Relevansinya dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep syirkah menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu (badan usaha) dan pembagian keuntungan. Imam Syafi'i dalam bukunya *al-umm* dimana syirkah Mufawadhah batal kecuali keduanya itu bersarikat, keduanya mempersiapkan secara sama-sama (mufawadhah) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung bersama.
2. Syirkah dalam fiqh Islam ada beberapa macam: diantaranya ada yang kembali kepada perjanjiannya , dan ada juga kembali kepada pemiliknya . Dari sisi hukumnya menurut syariat, ada yang di sepakati ada juga yang masih di perselisihkan hukumnya. Undang-undang perbankan yakni Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUP), telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan Indonesia dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi(*intermediary institution*), yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Dalam mendistribusikan dana kepada masyarakat, bank syariah dapat melakukannya dengan prinsip *murabahah, ijarah, salam, istishna, mudharabah* dan *musyarakah*.
4. Imam Syafi'i menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan tergantung pada modal yang mereka sepakati, demikian juga halnya bila terjadi kerugian. Seiring dengan diberlakukan UU No.7 tahun 1992 dan kemudian disempurnakan melalui UU No. 10 tahun 1998 tentang reformasi peraturan perbankan, yang diinterpretasikan untuk memberikan peluang seluas-luasnya membuka usaha perbankan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip bagi hasil (*bank syariah*). Perkembangan perbankan syariah yang hingga kini menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan walaupun populasinya tidak sebesar bank-bank umum konvensional lainnya.

B. Saran-saran

1. Dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan pada saat sekarang ini, masyarakat semakin yakin bahwa dalam dunia bisnis, usaha dangang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan, mereka selalu memakai konsep yang terdapat dalam perekonomian pada saat sekarang ini ,dari pada memaki konsep syirkah.
2. Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu memberi saran sebagai berikut : pada masyarakat umumnya kaum muslimin pada khususnya, bahwa sudah saatnya Konsep Syirkah dikombinasikan dengan konsep Syirkah menurut Perbankan Syariah, bahkan sedikit sekali untuk memperhatikan nilai haramnya, karna sistem perbankan tidak kalah bagusnya dengan bank konvesional.
3. Jika dimungkinkan bagi kita untuk meninggalkan sistem perekonomian saat sekarang yang nyata-nyata membawa kepada kehancuran, dengan demikian kita harus berani mengatakan konsep syirkah itu merupakan salah satu sistem perbankan yang bisa dipakai didalam perekonomian bernuansa keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman I-Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002),
- A.Syafi'i jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru:Suska Prees, 2008),
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*,terjm. Amiruddin,(Jakarta:Pustaka Azzam,2006)
- Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqih*,(Jakarta:Kencana,2002).
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj.H. Ismail Yakub, (Malaysia : Victory Agencie, 1989),
- Ahmad As-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, terj., Sabil Huda, H.A. Ahmadi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991).
- Basbullah Bakry, *Pedoman islam di Indonesia*,(Jakarta: UI-Press,1988).
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiktopedi Hukum Islam*,(Tampa tempat: Ictisar baru Van Hoeve,1996).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: PT Al ma' Arif,2000),
- Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi Perseroan dan Asuransi*, (Bandung, Al-Ma'aruf, 1998
- Huzaimah Tahido Yangga, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997),
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Bulan Bintang,1974),
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul'I Mujtahid*, Terj.M.A.Abdurrahman, (Semarang:Asy Syifa; 1990),
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj., Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*,(Jakarta: UI Press.1988),
- M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta : Liberty, 1991),

- M.Alihasan, *Transaksi dalam islam Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT.Raja Grafindo Persada, 2004),
- Moh.Rifa, *Mutiara Fiqih*, (Semarang: CV Toha putra th...)
- Muhammad Zuhri, ***Riba dalam Al-qur'an dan Masalah Perbankan*** (Sebuah tilikan Antisifatif), (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 1997).
- M. Ali Hasan, ***Perbandingan Mazhab***, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Moenawir Chalil, ***Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'i, Hambaly***, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Muhammad 'Afif Az-Za'by, ***Nasihat Imam Syafi'i***, (Bandung: Al-Bayan, 1992).
- Moenawir Chalil, ***Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'i, Hambaly***, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Rachmad Syafe'i, MA, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia,2004).
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta:Gema Insani Press,2005),
- Syekhli Ali Ahmad Al- Jarwi, *Syariat Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2006),
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.12*, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset 1988),
- Suhrawardi K. Lubis, ***Hukum ekonomi Islam***, (Jakarta: Sinar Grafika,2000).
- Sulaiman Rasyid, ***Fiqih Islam***, (Bandung : Sinar Baru, 1992),
- Syaikh Ahmad Farid, ***60 Biografi Ulama Salaf***, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006),
- Warkum Sumitro, Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press,1997).
- Sulaiman Rasyid, ***Fiqih Islam***, (Bandung : Sinar Baru, 1992),
- Warkum Sumitro, ***Azas-azas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait*** (BAMUI dan Takaful) di Indonesia, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997).

UU RI No. 10 tahun 1998, *Tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

Wahban Az-Zuhaili, *Fighul Islam*, Juz III, (Bairut: Darul al Fikr, t.th).

Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),

Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhar*, (Bairut: Daul al-Fikr, t.th),

Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Islam Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),

Syyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : Alma'arif, 1988),